

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Pilgub secara langsung sebagai bentuk amanat normatif atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan partisipatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 menarik untuk diteliti karena masih terdapat isu identitas yang dimainkan oleh kedua pasangan calon. Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mengklaim diri mereka sebagai putra daerah Sumatera Utara yang pantas untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka mengatakan demikian karena Edy telah lama tinggal dan mengerti betul permasalahan di Sumatera Utara walaupun beliau tidak terlahir di Sumatera Utara, sedangkan

paslon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dianggap sebagai calon pendaftar yang mengadu nasib ke Sumatera Utara.

KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai pemenang dalam Pilgub Sumut 2018 sesuai dengan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/PL.03.7-Kpt/12/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**  
**Sumatera Utara Tahun 2018**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		$\Sigma$	%
1.	Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	3.291.137	57,58
2.	Djarot Saiful Hidayat dan Sihar PH Sitorus	2.424.960	42,42
Jumlah		5.716.097	100,00

*Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2018*

Paslon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) unggul di kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir timur Sumut dan kabupaten/kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan pasangan Djarot dan Sihar (Djoss) unggul di kabupaten/kota di pesisir barat Sumut yang mayoritas penduduknya adalah suku Batak dan beragama Kristen. Berikut adalah tabel perolehan suara Eramas di Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan bersuku non-Batak.

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Suara Eramas di Kabupaten/Kota dengan Penduduk**  
**Mayoritas Beragama Islam dan Bersuku non-Batak**

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara ( $\Sigma$ )	
		Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	Djarot dan Sihar Sitorus
1.	Asahan	224.950	74.333
2.	Batu Bara	124.911	49.252
3.	Deli Serdang	458.646	250.717
4.	Labuhan Batu	135.109	43.305
5.	Labuhanbatu Selatan	81.779	37.647
6.	Labuhanbatu Utara	102.524	40.668
7.	Langkat	326.043	134.233
8.	Mandailing Natal	162.034	19.900
9.	Padang Lawas	97.606	19.740
10.	Padanglawas Utara	86.713	23.343
11.	Serdang Bedagai	175.775	77.115
12.	Tapanuli Selatan	93.884	29.974
13.	Binjai	83.229	26.794
14.	Medan	551.641	357.377
15.	Padang Sidempuan	85.930	15.476
16.	Tanjungbalai	49.288	12.319
17.	Tebingtinggi	49.969	21.171

*Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2018*

Tabel di atas menunjukkan perolehan suara Eramas, sedangkan perolehan suara Djoss per Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas beragama Kristen dan bersuku Batak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Suara Djoss di Kabupaten/Kota dengan Penduduk**  
**Mayoritas Beragama Kristen dan Bersuku Batak**

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara ( $\Sigma$ )	
		Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	Djarot dan Sihar Sitorus
1.	Dairi	26.956	119.713
2.	Humbang Hasundutan	4.905	73.915
3.	Karo	23.807	127.513
4.	Nias	5.427	40.629
5.	Nias Barat	6.107	20.532
6.	Nias Selatan	23.534	73.616
7.	Nias Utara	5.761	26.606
8.	Pakpak Bharat	7.518	11.973
9.	Samosir	2.321	54.566
10.	Simalugun	178.022	194.235
11.	Tapanuli Tengah	32.592	109.732
12.	Tapanuli Utara	13.178	137.350
13.	Toba Samosir	5.064	75.694
14.	Gunungsitoli	7.854	38.399
15.	Pematangsiantar	41.551	68.604
16.	Sibolga	16.507	19.019

*Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2018*

Kedua tabel di atas memperlihatkan bahwa daerah-daerah dengan populasi mayoritas Muslim memenangkan paslon Erasmas, sedangkan daerah-daerah dengan populasi non-Muslim memenangkan paslon Djoss. Fenomena tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Fenomena tersebut tidak lepas

dari isu yang dimainkan oleh pasangan calon itu sendiri dalam strategi pemenangan mereka.

Isu-isu yang berkaitan dengan etnik, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elit politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya.<sup>1</sup> Politisasi merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.<sup>2</sup> Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial dimana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Fenomena politisasi identitas dapat dijelaskan menggunakan teori populisme, populisme Islam misalnya. Populisme Islam, pada gilirannya, berubah arah menjadi populisme Islam model baru yang digunakan oleh sekelompok populis yang tergabung dalam aliansi antar kelas guna mendapatkan kekuasaan.<sup>4</sup> Definisi mengenai populisme sebenarnya belum didefinisikan secara pasti oleh para ilmuwan, namun setidaknya ada tiga variasi dalam mendefinisikan populisme, yaitu populisme sebagai ideologi, populisme sebagai *discursive style*, dan

---

<sup>1</sup> Marcus Mietzner. (2014). Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy Vol.25 No.4. Hlm. 111-125.*

<sup>2</sup> Ademola Adediji. (2016). *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation.* Berlin: Springer VS.

<sup>3</sup> Burke, P. J. (2003). *Introduction.* In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*. New York: Plenum Publishers.

<sup>4</sup> Vedi R. Hadiz. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middel East.* Cambridge University Press.

populisme sebagai strategi.<sup>5</sup> Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa populisme yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 adalah populisme yang dimaknai sebagai strategi, yaitu isu populis dimainkan aktor politik untuk menjatuhkan lawan politiknya dan untuk memenangkan kompetisi dalam Pilkada.

Isu yang paling terlihat dalam pergelaran Pilgubsu 2018 adalah terkait politisasi identitas, terutama terkait suku dan agama. Edy Rahmayadi berpendapat bahwa sejatinya masih banyak putra/putri daerah di Sumatera Utara yang layak untuk maju di Pilgubsu 2018, namun mengapa harus mengambil calon dari luar Sumatera Utara yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan emosional dengan Sumatera Utara, apalagi memahami persoalan yang ada di Sumatera Utara. Menyikapi isu putra daerah tersebut, Djarot menganggap dirinya maju di Pilgub Sumut 2018 semata-mata hanya untuk mengabdikan dirinya, dimana pun ia ditugaskan sepanjang itu di wilayah NKRI dan sepanjang itu tidak menabrak ketentuan yang berlaku. Belum lagi isu terkait agama, dimana Sihar Sitorus sebagai cawagub yang berpasangan dengan Djarot adalah seorang Nasrani.

Peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian karena penduduknya yang begitu heterogen dan majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di Pulau Sumatera, Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam konteks politik.

---

<sup>5</sup> Gidron, Noam dan Bart Bonikowski. (Tanpa Tahun). Varieties of Populism: Literatur Review and Research Agenda. *Working Papper Series: Weatherhead center for Intenational Affairs Harvard university. No. 13-0004.*

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah	
		$\Sigma$	%
1.	Islam	8.579.830	66,09
2.	Kristen	3.509.700	27,03
3.	Katolik	516.037	3,97
4.	Hindu	14.644	0,11
5.	Budha	303.538	2,34
6.	Kong Hu Chu	984	0,01
7.	Lainnya	5.088	0,04
8.	Tidak Dijawab	1.760	0,01
9.	Tidak Ditanyakan	50.613	0,39
Total		12.982.204	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2010

Semua agama yang ada di Indonesia juga ada di Sumatera Utara. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, namun penganut agama Kristen juga sangat besar di Sumatera Utara.<sup>6</sup> Disusul dengan agama lainnya, seperti Katolik, Hindu, Budha, dan agama nenek moyang, seperti Parmalim yang merupakan agama asli suku Batak.

<sup>6</sup> Bawaslu RI. (2017). *Laporan Penelitian : Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. Jakarta: Bawaslu RI.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berdasarkan Suku**

No.	Suku	Jumlah	
		$\Sigma$	%
1.	Batak	5.443.438	41.93
2.	Jawa	4.234.795	32.62
3.	Nias	825.668	6.36
4.	Melayu	768.546	5.92
5.	Tionghoa	398.554	3.07
6.	Minang	345.327	2.66
7.	Aceh	133.717	1.03
8.	Banjar	125.927	0.97
9.	Banten	46.736	0.36
10.	Sunda	35.052	0.27
11.	Papua	11.684	0.09
12.	Asal Luar Negeri	29.859	0.23
13.	Lainnya	582.901	4.49
Total		12.982.204	100,00

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2010*

Sumatera Utara memiliki keragaman agama, suku, dan antargolongan. Suku yang dominan di Sumatera Utara adalah Batak, Jawa, Nias dan Melayu.

Masyarakat Sumatera Utara memiliki pilihan politik yang berbeda dalam pergelaran pemilihan umum, seperti dalam Pilgubsu 2018 ini. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak terlalu terbuka dalam hal pilihan politik. Jika diteliti secara mendalam, masyarakat cenderung menentukan pilihannya berdasarkan faktor kesamaan agama dan suku bahkan termakan isu politik identitas yang dimainkan pasangan calon.



Clifford Geertz mengemukakan pandangannya tentang ikatan primordialisme dalam politik yang beberapa pandangannya mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa untuk konteks Indonesia dua ikatan primordialisme terpenting adalah suku dan agama. Hal tersebut sama seperti apa yang terjadi pada Pilgubsu 2018 ini.<sup>7</sup>

Masyarakat Batak dan beragama Kristen cenderung mendukung pasangan Djarot-Sihar (Djoss), sedangkan masyarakat non-Batak dan beragama Islam cenderung mendukung pasangan Edy-Musa Rajekshah (Eramas). Kecenderungan ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ian Pasaribu dan Irfan Prayogi yang mengatakan bahwa kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah tidak terlepas dari pemanfaatan imajinasi kolektif yang pernah lekat dalam stereotip Umat Islam (Aksi Bela Islam 212). Hal ini terbukti dengan kemenangan Eramas pada basis daerah kabupaten/kota yang bermayoritas Agama Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena politik identitas dalam Pilgub Sumut 2018 di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “*Politisasi Identitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*”.

---

<sup>7</sup> Osbin Samosir. 2017. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat (Sudi Pileg: PDI Perjuangan dan Partai Golkar Tahun 2004 dan 2009)*. Jakarta: UKI Press. Hlm.25.

<sup>8</sup> Ian Pasaribu dan Irfan Prayogi, 2018. Bekerjanya Politisasi Identitas pada Pilkada Sumut 2018 (Menakar Pengaruh Isu Agama terhadap Kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah). *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol.4 No.1 2018. Hlm. 11-28.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena politisasi identitas dalam Pilgubsu tahun 2018. Adapun, rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1. Bagaimana dinamika politik dalam Pilgub Sumut 2018?
2. Bagaimana bentuk-bentuk politisasi identitas dalam Pilgub Sumut 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun, rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses dinamika politik dalam Pilgub Sumut 2018.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi identitas dalam Pilgub Sumut 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu politik dalam hal studi politik identitas dalam pilkada khususnya pilgub dan memberikan kontribusi terhadap pembahasam politik identitas dalam Pilgub Sumut 2018. Sejalan dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan peneliti dan pembaca mampu memahami dinamika pilkada di setiap pemilihan umum khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilih agar memilih pemimpin berdasarkan kapasitasnya. Dengan sadarnya masyarakat tentang politisasi identitas, konflik horizontal di tengah masyarakat Sumatera Utara dalam ajang pilkada dapat diminimalisir bahkan dihindari.

### 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebagai bahan referensi dari penelitian ini, maka peneliti mencantumkan dua penelitian terkait, sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul “*Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)*” karya Adrian Fikri, mahasiswa Sarjana Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Adrian Fikri menarik kesimpulan bahwa masih berkembangnya isu sentimen SARA yang dimainkan masing-masing tim sukses pasangan cagub/cawagub, terutama berkembangnya isu agama yang menyudutkan salah satu paslon.
2. Tesis yang berjudul “*Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)*” karya Sugiprawaty, mahasiswa Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Sugiprawaty menyatakan bahwa etnisitas dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan semakin lemah, sentimen etnis juga lemah walaupun sengaja dimunculkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-

ikatan primordial. Perilaku pemilih sudah mulai berdasarkan rasionalitas dengan mempertimbangkan visi, misi dan program yang ditawarkan para kandidat saat kampanye.

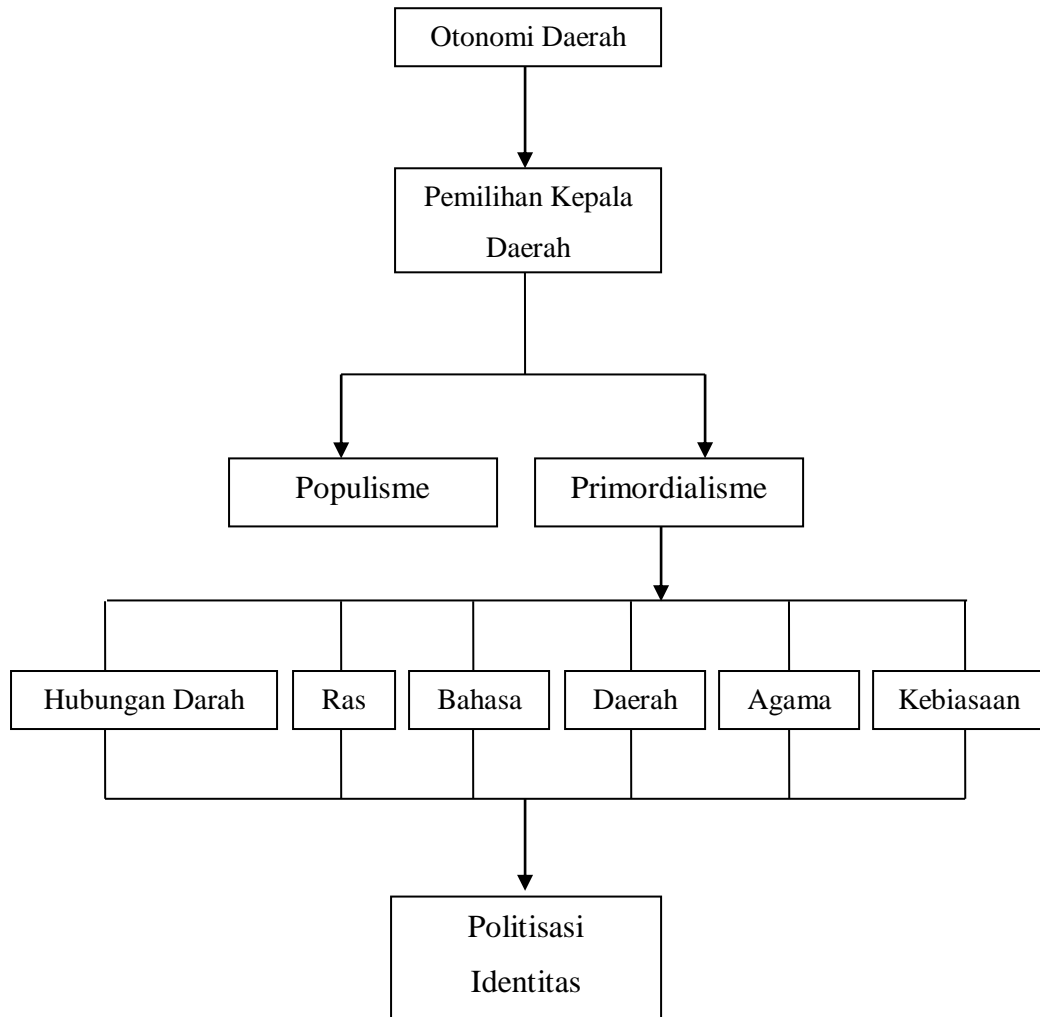
Berdasarkan dua penelitian terkait ditemukan bahwa pada Pilgub DKI Jakarta 2012 masih terdapat isu SARA yang dimainkan salah satu paslon yang efektif meraih suara mayoritas dari masyarakat, sedangkan pada Pilgub Sulsel 2009 walaupun sentimen etnis digulirkan salah satu paslon tidak berhasil meraih suara mayoritas dari masyarakat karena masyarakat sudah memilih berdasarkan rasionalitas. Hal yang berbeda terlihat dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah akan menggambarkan fenomena politisasi identitas dalam Pilgub Sumut 2018 tanpa menilai mana yang benar dan mana yang salah, dalam artian peneliti hanya menggambarkan apa yang terjadi. Peneliti juga memaparkan fenomena politisasi identitas dari sudut pandang Paslon nomor 1, Paslon nomor urut 2, serta pendapat dari ahli yang kompeten di bidangnya.

Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah elit politik atau tim sukses kedua pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Teori utama dalam penelitian ini adalah teori populisme yang diturunkan pada politik identitas tepatnya isu primordial suku dan agama yang dimainkan oleh kedua pasangan calon. Populisme yang peneliti terjemahkan dalam penelitian ini adalah sebagai strategi politik untuk menjatuhkan lawan politiknya demi meraih

suara terbanyak dengan memenangkan pilkada. Hal tersebut tersaji dalam bagan berikut ini.

**Gambar 1.1** Kerangka Pemikiran



*Sumber: diolah oleh peneliti*

### 1.5.1 Populisme

Ditinjau dari segi bahasa, populisme merupakan akar bahasa Romania “*populis*” yang berarti rakyat. Selain itu dari bahasa latin “*popus*” yang juga

populis.<sup>9</sup> Populisme di banyak literatur selalu dikatakan sebagai *term* yang susah untuk didefinisikan mengingat kelonggaran yang dapat melewati berbagai pembelahan ideologi baik kanan maupun kiri. Namun bukan berarti tidak ada titik temu dalam menerjemahkan apa itu populisme. Titik tersebut dapat dilihat melalui 4 karakteristik, yaitu,<sup>10</sup> (1) tema sentral seputar rakyat; (2) mereka mengkritik elit; (3) mereka memahami bahwa rakyat adalah entitas yang homogeny; dan (4) mereka menyatakan adanya krisis yang serius. Aktor populis berargumen bahwa pengaruh politik, identitas kultural atau situasi ekonomi mengancam rakyat biasa dan harus dilindungi. Tidak peduli krisis tersebut benar atau tidak.

Pembahasan sentral dalam populisme memang mengenai rakyat yang dikhianati elit tetapi juga mengenai sesuatu yang membahayakan kelompok yang tidak termasuk dalam rakyat misal *immigrant* atau orang dengan ras yang berbeda.<sup>11</sup>

Noam Gidron dan Bart Bonikowski adalah ilmuwan politik yang mencoba membuat rangkuman komparatif untuk melihat pertarungan definisi populisme. Menurut Gidron dan Bonikowski perbedaan definisi populisme bergantung dari konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ia kemudian merangkum 3 definisi populisme yang berkembang di dunia ini yaitu populisme sebagai sebuah ideologi, populisme sebagai *discursive style* dan populisme sebagai strategi

---

<sup>9</sup> Boy Ricardo. (2014). "Perubahan Pemilih pada Pilkada Jakarta Putaran Kedua". *Jurnal Politik*. Vol. 10/No/ 01/2014. Hlm.1387.

<sup>10</sup> Matthijs Rooduijn, Sarah L de Lange dan Wouter Van der Brug. (2012). "A Populist Zeitgeist? Programmatic Contagion by Populist Parties in Western Europe". *Journal SAGE*.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 7.

politik.<sup>12</sup> Namun demikian, dalam penelitian ini penulis hanya membahas populisme yang dipahami sebagai strategi politik saja.

Populisme sebagai strategi politik memfokuskan diri pada metode dan instrumen pemenangan dan penggunaan kekuasaan/*exercising power*. Selain itu titik tekan pada populisme sebagai sebuah strategi politik ada pada pilihan kebijakan, organisasi politik dan kerangka mobilisasi.<sup>13</sup> Karakteristik dari populisme sebagai strategi politik, calon atau penguasa yang *legitimate/actual ruler deploys* memiliki kapabilitas dalam berkuasa. Beberapa aktor politik dapat menggunakan strategi yang berbeda-beda untuk memenangkan dan menjaga kekuatannya di pemerintahan.

Menurut Weyland kemunculan populisme ketika terdapat upaya dari aktor politik untuk menjalin kedekatan hubungan dengan warga masyarakat dan konstituennya dengan menggunakan program-program yang berpihak pada aspirasi publik. Hal ini berarti secara tidak langsung Weyland juga menganggap populisme sebagai sebuah strategi politik. Selain strategi menggunakan program-program yang sesuai dengan aspirasi publik, dapat juga dengan menggunakan mobilisasi massa. Mobilisasi massa yang dilakukan dapat berupa terorganisasi atau tidak terorganisasi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Noam Gidron Bart Bonikowski. (Tanpa Tahun). *Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda. Working Paper Series: Weatherhead center for International Affairs*. Harvard University. Hml. 1-5.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hml.10.

<sup>14</sup> Kurt Weyland. (2001). "Clarifying a Contested Concept: Populism in The Study of Latin Amerika Politics." *Jurnal Comparative Politics, Vol. 34, No. 1 (Oct., 2001), Hlm. 14.*

Populisme sebagai strategi politik dianggap kontras dengan dua pendekatan sebelumnya. Populisme sebagai strategi politik lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dengan menggunakan pilihan-pilihan kebijakan yang pro rakyat, strategi organisasi dan kerangka mobilisasi massa. Ketiga pendekatan di atas sebenarnya tidak terlalu dapat dipisahkan karena dapat bersifat tumpang tindih.

### 1.5.2 Politik Identitas

Politik identitas merupakan sikap politik yang fokus pada sub kelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok subnasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>15</sup> Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (*self-identity*) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran.<sup>16</sup>

Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance* Ashgate. Hlm. 268.

<sup>16</sup> Ari Ganjar Hardiansyah. (2017). "Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014". *Jurnal Bawaslu Vol.3 No.2 2017, Hlm. 169-183*.

<sup>17</sup> Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press.



Permasalahan lainnya dari perjuangan politik identitas ialah siapa yang memberikan hak kepada kelompok yang mengatasnamakan identitas, misalnya agama atau etnis. Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan siapakah yang diemban dalam perjuangan politik identitas.<sup>18</sup>

Karena itu, gerakan perjuangan identitas saat ini sangat jarang terwujud atas ekspresi spontan. Para politisi saat ini memanipulasi politik identitas demi kepentingannya, misalnya kandidat harus merepresentasikan sub-sub kelompok yang ada di masyarakat. Elite politik sering bertindak seperti *entrepreneur* melakukan strategi-strategi yang oportunistik tentang bagaimana memobilisasi identitas untuk meningkatkan status baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun dalam kelompoknya. Politisasi identitas tidak hanya berwujud sebagai ekspresi perasaan atau pandangan kelompok tentang pengalaman tertentu misalnya diskriminasi, tetapi juga sebagai kendaraan instrumental dan oportunistik bagi elit yang orientasi kepentingan pribadi.<sup>19</sup>

Ketika politik identitas dimanipulasi oleh kepentingan elit politik, maka terdapat beberapa risiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi, dalam keadaan heterogenitas etnik yang seringkali menjadi hambatan bagi

---

<sup>18</sup> Ingram, D. (2004). *Rights, Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: Principle Compromises in a Compromised World*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. Hlm. 55.

<sup>19</sup> Weinstock, D. M. (2006). "The Real World of (Global) Democracy". *Journal of Social Philosophy*, 37(1), 6–20.

konsolidasi demokrasi.<sup>20</sup> Pertama, politik identitas membentuk hierarki dalam kelompok-kelompok minoritas. Ketika tuntutan-tuntutan dari kelompok politik identitas dipenuhi para elitnya semakin berani untuk meningkatkan tekanan terhadap para anggota kelompoknya dalam membela nilai-nilai tradisional di ruang publik. Sebaliknya, ketika tuntutan kelompok politik identitas tidak dipenuhi mereka dapat memicu “*cultural defensiveness*” yang juga memperkuat elit-elit konservatif yang mendorong para anggota kelompok untuk menaati tanda-tanda identitas secara ketat demi melindungi kelompok dari tekanan atau ancaman pihak luar.

Kedua, risiko gerakan politik identitas dikooptasi oleh negara. Politik identitas menjadi obat darurat untuk menyelesaikan masalah sosial yang kritis, termasuk rasisme, kemiskinan, dan perampasan (*dispossession*). Dampaknya, kelompok akan menonjolkan sisi primordialisme dan aspek sakral secara berlebihan, dan meningkatkan stereotip pada kelompok-kelompok lawannya. Para pejabat pemerintah cenderung dipengaruhi pandangan-pandangan stereotip dalam memutuskan kebijakan atau perkara.

Ketiga, komunitas demokratis akan dilemahkan karena orang-orang mengacu pada basis-basis yang membedakan mereka daripada menyatukan mereka. Modal sosial yang berbasis pada saling percaya sulit dicapai akibat fragmentasi etnik dan keagamaan. Keempat, identitas adalah pokok yang sulit untuk didialogkan secara

---

<sup>20</sup> Birnir, J. K. (2007). *Ethnicity and Electoral Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, Hlm. 61.

rasional serta *non-negotiable*, sehingga berpotensi menciptakan *deadlock* dan konflik terbuka.<sup>21</sup>

Alcoff and Mohanty (2006: 2) menunjukkan bahwa pertarungan politik yang memanipulasi dengan isu-isu identitas akan menyebabkan elit-elit politik cenderung mudah menggunakan isu-isu yang dapat memobilisasi massa secara efektif. Selain itu, penggunaan isu-isu identitas juga menggambarkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk menunjukkan kinerja secara substantif, sehingga pertanyaan lebih diarahkan pada isu-isu non substansial. Isu-isu substansial lebih dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan isu-isu kebijakan.

Politik identitas bicara tentang ikatan primordialisme yang terjalin di tengah masyarakat. Primordialisme diperkenalkan pertama kali oleh Edward Shils (1957) yang menemukan berbagai ikatan sosial yang dibedakan atas ikatan personal, primordial, dan sakral. Ikatan-ikatan tersebut masih bertahan dalam dunia yang sudah modern. Pendekatan ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek sebagai hal yang tidak bisa dibantah.<sup>22</sup> Kegoncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa sebab yang seringkali timbul bersama dan berlawanan tujuan, secara deskriptif, masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Weinstock, D. M. (2006). "The Real World of (Global) Democracy". *Journal of Social Philosophy*. Vol. 37 No.1, Hlm. 6–20.

<sup>22</sup> Sugiprawaty. (2009). Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Th.2007-2008). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Hlm. 32.

- a) Hubungan darah, yang penting dalam hal ini adalah kekeluargaan, karena hubungan yang wujud, akibat biologis (keluarga besar garis keturunan dan sebagainya) terlalu terbatas untuk dianggap cukup berarti, oleh karena itu pengenalan lebih bersifat hubungan keluarga yang lebih sosiologis seperti kesukuan.
- b) Ras, mirip dengan kesukuan dalam arti bahwa ia melihat teori etno-biologis. Tetapi keduanya sesungguhnya amat berbeda, ciri utamanya adalah bentuk-bentuk fisik yang fenotipis terutama warna kulit, bentuk muka, tinggi badan, bentuk rambut. Masalah-masalah perkauman (*communalism*) di Malaya sebagian besar timbul dari perbedaan ini sekalipun kedua pihak berasal dari jenis fenotipis Mongoloid yang sama.
- c) Bahasa, karena sesuatu hal yang belum dapat diterangkan secara memuaskan, sehingga hal ini bermasalah di India dan di Malaya dan secara sporadis juga terjadi di beberapa tempat di dunia. Akan tetapi karena bahasa seringkali dipandang sebagai poros esensi konflik-konflik nasional, ada baiknya ditegaskan dalam hal ini bahwa linguisme bukanlah suatu akibat yang pasti lahir dari keanekaragaman bahasa. Perbedaan-perbedaan bahasa tidak selalu menjurus pada perpecahan. Atau menjadi masalah sosial yang besar, walaupun sering timbul kebingungan tentang penggunaan bahasa.
- d) Daerah. Hal ini menjadi faktor di hampir setiap pelosok dunia, kedaerahan dengan sendirinya menjadi masalah serius di daerah-daerah geografis yang heterogen.

- e) Agama. Kasus yang terkemuka akibat keterkaitan agama ini adalah orang Karen, Araken, dan Rohingya Islam (Myanmar), orang Batak Toba, Ambon, dan Minahasa (Indonesia), orang Moro (Filipina), orang Sikh di Punjab (India), semua ini contoh-contoh terkenal tentang kekuatan ikatan keagamaan dalam menghambat ataupun menggagalkan perasaan kebangsaan di suatu negara.
- f) Kebiasaan. Perbedaan-perbedaan dalam bentuk kebiasaan sering merupakan dasar dari salah satu segi perpecahan nasional. Gejala ini terutama berperan penting dalam hal dimana satu kelompok yang secara intelektual dan kesenian merasa dirinya pembawa peradaban di tengah-tengah penduduk lain yang dianggap kasar dan yang harus berpedoman pada golongan yang unggul. Akan tetapi perlu dicatat bahwa golongan yang amat berbeda satu dari yang lain dapat menjalankan gaya hidup umum yang sama.<sup>23</sup>

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Pada penelitian ini, konsep penelitian yang peneliti gunakan adalah mengenai konsep primordialisme suku dan agama dan putra daerah yang digulirkan oleh pasangan Edy Rahmyadi-Musa Rajekshah pada Pilgub 2018. Hal ini terkait pada teori populisme mengenai strategi politik yang diambil oleh pasangan tersebut dalam memenangkan kompetisi pemilihan kepala daerah.

- a. Primordialisme merupakan ikatan emosional dan mendalam yang terbentuk oleh konstruksi dari kondisi sejarah untuk menjaga keutuhan

---

<sup>23</sup> Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Book, Inc, New York. Hlm. 263.

solidaritas kelompok. Dalam hal ini adalah masyarakat yang memilih calon berdasarkan unsur kesamaan tertentu.

- b. Populisme merujuk pada gerakan politik yang dipimpin oleh individu dengan kualitas dan karisma yang kuat, mampu mengorganisir massa dengan retorika yang berpusat pada penyebab dan solusi terhadap ketidakadilan.
- c. Politik identitas merupakan tindakan politik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang memiliki kesamaan identitas untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya melalui proses-proses politik, sedangkan politisasi identitas merupakan strategi yang didahului oleh eksploitasi terhadap identitas-identitas politik di tengah masyarakat.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian terhadap politisasi identitas dalam Pilgub Sumut 2018 ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Krik dan Miller pada mulanya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

---

<sup>24</sup> Kirk, Jerome dan Marc. L Miller. (1986). *Reliability and Validity in Aualitative Research*. London: SAGE Publications. Hlm. 9.

<sup>25</sup> Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 5.

statistik dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>26</sup>

### 1.7.2 Situs Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi yang melaksanakan Pilgub Sumut Tahun 2018.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Memahami kancan penelitian yang lebih dalam, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan dan pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian.<sup>27</sup> Peneliti memfokuskan informan pada kader partai utama pengusung kedua pasangan calon, yaitu Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan, konsultan politik, serta pengamat politik setempat.

**Tabel 1.5**

**Data Informan dalam Penelitian**

No.	Nama Informan	Status
1.	Jefry Pakpahan	Anggota Partai Gerindra. Sumatera Utara
2.	Meryl Rouli Saragih	Wasek DPD PDI-P Sumatera Utara
3.	Walid M. Sembiring	Konsultan Politik Eramas
5.	NN	Admin Yayasan Haji Anif
4.	Bongsu Pakpahan	Pengamat Politik Sumatera Utara
5.	Shohibul Anshor Siregar	Pengamat Politik Sumatera Utara

*Sumber: diolah oleh peneliti*

<sup>26</sup> Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi. Hlm. 8.

<sup>27</sup> Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 199.

#### **1.7.4 Jenis Data**

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis. Pertama adalah data primer. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Kedua adalah data sekunder, yaitu data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer, seperti dari Keputusan KPU Provinsi, dan artikel terkait.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan sebagai berikut.

##### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan memakai panduan wawancara.



## b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara berdasarkan jawaban narasumber.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, *display* data sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Pada tahapan interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

### **1.7.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik, salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini, triangulasi diperoleh dari narasumber di luar elit partai, seperti pengamat politik setempat.